

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bangsa, Kebangsaan, dan Rasa Kebangsaan

Revolusi Prancis tahun 1789 - 1799 M, merupakan awal dari sejarah dimana paham kebangsaan moderen lahir. Masyarakat Prancis yang telah geram dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Prancis yang tidak stabil mendorong rakyat Prancis untuk melakukan pemberontakan terhadap Raja Louis ke 16.

Revolusi Prancis mampu menurunkan tahta raja Louis ke 16 setelah melalui pertempuran yang sangat sengit antara pemerintahan raja dan rakyat. kemudian rakyat Prancis menghendaki satu bentuk pemerintahan baru yaitu pergantian bentuk pemerintahan monarki absolute diganti dengan demokratis. Bangsa Prancis kemudian menyepakati tiga hal yang menjadi gagasan besar yaitu, *Egaliter* (Persamaan), *Liberty* (Kebebasan), *Fraternite* (Persaudaraan) (Husaini, 2005).

Konsep ini menyebarkan dampak yang meluas di daratan Eropa untuk menjadi satu kesatuan bangsa yang berdaulat. Masa kegelepan Eropa melahirkan peradaban yang baru dan tercerahkan. Dampak revolusi Prancis melahirkan revolusi juga di bidang politik, teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini mendorong satu sistem dan keadaan sosial yang baru dalam kehidupan masyarakat Eropa.

Penguatan atau penyadaran tentang tujuan untuk hidup sejahtera secara bersama, melahirkan pergeseran dari masa kegelapan menuju abad pencerahan (*aufklarung*) di Eropa. Konsep kebangsaan Eropa menyatakan bahwa manusia itu setara, derajat manusia sejatinya ditentukan oleh setiap kompetensi manusia itu

sendiri. Revolusi Prancis ini dalam substansinya mengubah struktur dalam masyarakat Eropa (Husaini, 2005).

Keadaan struktur sosial masyarakat Eropa yang dulunya menganggap satu kesatuan Kawasan Eropa dalam etnis yang sama berubah menjadi beberapa bangsa-bangsa baru. Bangsa baru ini lahir karena adanya satu kesatuan tekad dan tujuan yang sama karena faktor penyebab sejarah, Bahasa, budaya, wilayah, dan tujuan bersama untuk mencapai suatu kondisi negara bangsa yang menjadi wadah untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Pemerintahan Eropa berubah struktur politiknya, yang dulunya menganut sistem monarki absolute dimana raja memegang kuasa atas seluruh keadaan masyarakat. Raja ketika menjabat dulu di Eropa memiliki kuasa atas eksekutif (kepala negara dan pemerintahan), legislatif (pembuat kebijakan), dan yudikatif (pengawasan). Setelah revolusi Prancis bentuk negara dan pemerintahan berubah dari konsep monarki absolute menuju sistem Republik atau demokrasi yang kita kenal dalam konsep negara bangsa moderen.

Konsep negara dan bangsa di Eropa mengubah sistem pemerintahan Eropa dan dunia pada umumnya menjadi lebih mengedepankan penghormatan terhadap setiap individu karena kemampuannya. Konsep pemisahan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif diatur supaya kekuasaan absolute tidak tertumpu pada satu sektor pemerintahan. Pembagian kekuasaan diharapkan akan menciptakan kondisi dimana tujuan hidup Sejahtera dapat lebih terukur dan terealisasi dengan cepat (Husaini, 2005).

Negara-negara Eropa yang masih mempertahankan konsep kerajaan tidak menjadikan raja sebagai kepala pemerintahan melainkan hanya kepala negara saja. corak dari negara kerajaan Eropa adalah mennggunakan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai senat yang membentuk undang-undang, dan Lembaga Peradilan sebagai mahkamah yudukatif yang melakukan pengawasan kinerja pemerintahan.

Bangsa menurut seorang Filsuf Prancis bernama Ernest Renan (dalam Hartono & Sunario1994), adalah sebuah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Bangsa lahir dari kesamaan cita-cita dan Sejarah yang membentuk sikap setia kawan. Sedangkan menurut Bauer (2000), bangsa dijelaskan sebagai suatu komunitas individu yang memiliki karekteristik yang terbentuk atas nasib yang sama. Bangsa merupakan suatu komunitas individu dengan karakteristik yang terbentuk karena adanya persamaan nasib. Karakteristik yang terbentuk karena adanya persamaan nasib, pengalaman Sejarah, budaya yang tumuh dan berkembang akan membentuk perbedaan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya.

Menurut Herzt (dalam Coakley, 2012), bangsa memiliki arti dan ciri kesatuan yang terbentuk dalam kultural, sosial, ekonomi, dan politik. Kemerdekaan dari kolonialisasi dan imprealisasi, membentuk ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Selain ciri-ciri pembentuk bangsa, ada pula unsur pembentuk suatu komunitas bernama bangsa ialah memiliki persamaan nasib, kehendak bersatu, berada dalam satu wilayah tertentu, keinginan unruk membentuk pemerintahan sendiri, memiliki persamaan dalam karakter, budaya, dan bahasa.

Bangsa dan rasa kebangsaan juga dapat terbentuk dari sebuah komunitas politik yang dibayangkan. Kisah tentang asal-usul suatu bangsa menciptakan komunitas imajiner diantara warga negara moderen dalam komunitas imajiner. Komunitas yang membayangkan karena adanya persatuan sebagai suatu komunitas yang lahir dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang terjadi pada setiap individu atau entitas tertentu yang dipahami sebagai suatu persahabatan yang horizontal. Persahabat ini akan menghasilkan suatu ikatan yang kuat meski antar individu atau entitas tidak pernah bertemu (Anderson, 2006).

Apabila kita melihat struktur pembentuk dan penjelasan melalui para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa bangsa adalah suatu komunitas yang menduduki suatu wilayah tertentu dengan Sejarah, tujuan, penderitaan dan cita-cita yang sama untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Komunitas bangsa lahir dari berbagai macam persamaan yang diidentifikasi menjadi sebuah identitas kolektif dalam keberagaman individu-individu atau kelompok tertentu demi terciptanya suatu pemerintahan yang mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama.

Kebangsaan dan rasa kebangsaan dapat kita artikan sebagai suatu sikap warga negara dari pemerintahan yang terbentuk secara kolektif, untuk senantiasa menjaga komitmen keutuhan bangsa dan cita-cita bersama. Paham kebangsaan (nasionalisme) bagi suatu bangsa menekankan persatuan dalam bingkai perbedaan yang ada. Suatu visi menjaga keutuhan dan cita-cita bangsa merupakan hal yang mutlak dipahami oleh setiap individu bangsa.

2.2. Konsep kebangsaan Indonesia, Islam, dan Nahdlatul Ulama (NU)

Perjuangan dan pergerakan nasional membuahkan sebuah hasil yang sangat luar biasa dimana *Nations State* (Negara Bangsa), melalui deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 melahirkan bangsa dan negara baru yang berasal dari penyatuan berbagai macam kultur suku, budaya, dan bahasa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kesatuan bangsa yang baru yaitu bangsa Indonesia. Bangsa ini lahir dari suatu keadaan atas penderitaan dan perjuangan yang sama melalui semangat kemerdekaan dari kolonialisasi Belanda.

Momentum awal bangsa ini terbentuk pada 28 Oktober 1928 oleh Sugondo Djojopuspito, R.M Djoko Marsaid, Muhammad Yamin beserta dengan seluruh pelajar yang terhimpun dalam PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia) berkumpul di sebuah rumah kos, Jalan kramat No.106, untuk membuat sebuah rumusan kebangsaan melalui kongres yang kita kenal sekarang dengan sebutan Sumpah Pemuda. Butir-butir utama sumpah tersebut berisi tentang pernyataan beberapa entitas suku, budaya, dan bahasa yang berbeda menjadi satu komunitas yang memiliki paham bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Semangat berbangsa ini merupakan pekikan deklarasi yang membakar api semangat perjuangan semakin berkobar dan menyala-nyala (Ahmadin, 2017).

Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus bapak proklamator bangsa Ir. Sukarno menyatakan, “bahwa Indonesia bukan hanya untuk bernegara satu windu saja, melainkan bertujuan untuk bernegara seribu windu lamanya dan bernegara selama-lamanya”. Konsep berbangsa yang berasaskan gotong-royong dengan

semangat dan etos kerja yang tinggi terhadap kemajuan bangsa secara kolektif (gotong royong), merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa yang memiliki cita-cita luhur untuk hidup sejahtera secara bersama (Ahmadin, 2017).

Konsep gotong royong menjadi kesepakatan bersama dan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa *Bhineka Tunggal Ika* (meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua) adalah elemen penting untuk mencapai kemajuan. Para pendiri bangsa menekankan pentingnya mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya untuk mencapai tujuan nasional bersama. Para pendiri bangsa percaya bahwa Indonesia harus memainkan peran aktif di panggung dunia untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Diplomasi yang aktif dan solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya untuk membentuk tatanan dunia yang lebih adil. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat mencapai status sebagai negara yang maju dan sejahtera, di mana setiap warga negara menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat dalam kerangka negara yang menghargai keberagaman, berdaulat dan berkeadilan.

Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia datang dengan konsep mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang teratur. Islam datang dengan berbagai konsep kehidupan, bukan hanya sebagai dogma untuk menyembah sang pencipta. Kehidupan sosial, Pendidikan, ekonomi, dan politik telah diatur oleh Islam sebagai landasan berkehidupan yang baik bagi umat manusia melalui pedoman kitab suci Al-Qur'an.

Konsep kebangsaan Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW, menghendaki persatuan masyarakat di kota Madinah. Masyarakat Madinah yang beragama dengan berbagai macam kepercayaan dan suku-suku yang mendiami kota Madinah. Kaum Anshar, Muhajirin, Yahudi, Arab dan lainnya diatur dalam Piagam Madinah yang berisi semangat persatuan untuk hidup damai dan rukun di kota Madinah (Nafis, 2015).

Konsep pembaharuan tentang *siyasah* (politik) dan pembaruan Islam yang mengarah menuju negara bangsa yang sejahtera diungkapkan oleh salah satu cendekiawan Islam yang ber-Mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Mawardi. Konsep *Al-Balad* (tanah air) dijelaskan dalam tafsir Al-Mawardi yang berbunyi "*Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung sinai dan demi negeri yang aman ini*". (Qs. At-Tin: 1-3). Maksud kata "*At-Tin*" menjelaskan tentang damaskus, "*zaitun*" merupakan symbol negara palestina, gunung "*sinai*" simbol dari negeri syam. Penegertian "*Negeri yang aman*" mengacu pada kota mekah dan Madinah yang damai (Mawardi, 2010).

Penjelasan tentang berbagai macam peristiwa melalui symbol-simbol yang dijelaskan dalam surat *At-Tin* menurut Imam Al-Mawardi adalah bentuk kekayaan alam yang terdapat di negeri ini, negeri yang damai dan tentram yang harus senantiasa dijaga dan dicintai. Mewujudkan kondisi masyarakat yang jauh dari konflik, kekerasan, dan ancaman yang mengganggu negeri adalah tanggung jawab bersama. Sikap saling menghormati, menjaga, dan memajukan bangsa atau tanah air adalah tanggung jawab bersama. Allah Swt, dijelaskan dalam tafsir ini menganjurkan kepada seluruh umat manusia yang berpegang pada Al-Qur'an,

untuk senantiasa memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab di tanah air yang mereka tempati.

Surat *Al-Hujarat* ayat 13 menjelaskan ”bahwa sesungguhnya Allah swt, dalam penciptaan umat manusia yang beragam yaitu laki-laki dan Perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk senantiasa bertaqwa dan saling mengenal satu sama lain”. Menurut Al-Mawardi (dalam Bilfagih, 2016), menjelaskan suku itu terkait dengan asal-usul keturunan, bangsa terkait dengan wilayah dan keberagaman yang semuanya Allah Swt ciptakan terbagi kedalam berbagai pulau dengan berbagai pemimpin diantara suku-suku dan keberagaman bangsa. Paham kebangsaan ini mengindikasikan bahwa paham nasionalisme yang sejati adalah tentang sebuah konsep saling menghargai, menghormati perbedaan, serta membangun persatuan dalam keberagaman. Perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu rahmat yang harus dijaga sebagai suatu bangsa yang bersama-sama menjunjung tinggi kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam suatu negeri (Mawardi, 2010).

Pandangan politik Imam Al-Mawardi tentang kebangsaan terbagi kedalam beberapa tujuan dan konsep. *Pertama*, negara melibatkan semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. *Kedua*, persatuan dan keadilan adalah alat utama dalam mempertahankan keberagaman. *Ketiga*, menjaga kedaulatan dan memastikan keberlangsungan negara adalah tanggung jawab bersama (Mawardi, 2010).

Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki konsep dan paham Imam Al-Mawardi adalah Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul

Ulama, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, dan KH. Wahab Chasbulloh mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926 dengan kiblat *muamalah* (Fiqih) dan *siyasah* (politik) kepada Madzhab Syafi'i. Gagasan-gagasan tentang sebuah kebangsaan yang merdeka yaitu bangsa Indonesia merupakan salah satu bentuk gagasan yang senantiasa digaungkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dari masa kolonial hingga saat ini. Satu abad organisasi ini berdiri, selama itu pula paham kebangsaan senantiasa menjadi sebuah prioritas yang Nahdlatul Ulama jaga dalam setiap kiprah kebhinekaan nya di dalam tatanan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Herawati & Isana, 2023).

Kiyai Haji Hasyim Asy'ari (dalam Haldratusyekh, 1995), *Muqodimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama* (NU) menjelaskan “telah menjadi keniscayaan bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan untuk berkumpul (bersosial) dan senantiasa membaur di lingkungan dengan sesamanya, hal ini terjadi karena setiap individu tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri”. Oleh sebab itu, keutuhan masyarakat adalah modal utama dalam menangkal setiap keburukan dan mara bahaya. Kebersamaan dan ikatan batin adalah faktor pendorong rasa cinta kasih terhadap sesama. Masyarakat memegang kendali terhadap kekuasaan, Pembangunan berjalan secara terstruktur, dan pemerintahan mampu ditegakkan dengan hukum adalah buah dari persatuan. Keterbelahaan masyarakat adalah sebab hancurnya negara dan mengakibatkan mudahnya musuh masuk merusak negara.

Nahdlatul Ulama (NU), pergerakannya terbagi kedalam beberap bidang, di antaranya bidang agama, sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Ahlu Sunnah Wa

al-Jama'ah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih dan tasawwuf. Dalam akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nahdlatul Ulama juga menganut paham empat madzhab yaitu madzhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki dalam hal Fiqih. Bidang Tasawwuf, Nahdlatul Ulama mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Juwaini Al-Baghdad.

Proyeksi kebangsaan dan semangat persatuan terus di pupuk dalam segala sektor dan bidang kemasyarakatan. Istilah Nahdlatul Ulama yang terkenal dalam proyeksi kebangsaan adalah "*Al Muhafadhotu Ala Qodimus Sholih, Wal Ahdu Bil Jadiddil Aslah*" (Mempertahankan tradisi lama yang baik, dan menerima tradisi baru yang lebih baik) (Sholihuddin & Jazil, 2021).

Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa masyarakat NU adalah masyarakat yang dinamis terus bergerak menuju *Islah* (perbaikan) dalam segala bidang dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima dasar prinsip warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU) dalam mewujudkan *Islah* (perbaikan) dalam kehidupan bermasyarakat adalah *Tawassuth* (Moderat), *I'tidal* (keadilan), *Tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang), dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menegakan kebenaran mencegah kerusakan) (Baso, 2022).

Tawassuth (Moderat), merupakan pedoman warga Nahdliyin dalam menyikapi persoalan untuk senantiasa berada di pertengahan. Dalam kehidupan bermasyarakat warga NU harus menitikberatkan pada kesadaran akal sebagai penunjuk kebenaran dan senantiasa berhati-hati tidak berpihak atau mengambil

sikap tanpa pertimbangan. Dalil *aqly* (akal) dan *naqly* (Al-qur'an dan hadist) ditempatkan sebagai analisis dalam setiap persoalan kehidupan.

I'tidal (adil), adalah prinsip yang ditekankan terhadap kaum nahdliyin untuk senantiasa bersikap dan bersifat tegak lurus dalam menyikapi persoalan. Adil dalam Nahdlatul Ulama diartikan dengan “*wad'u sya'in fi mahalihi*” (menempatkan sesuatu perkara pada tempatnya). Untuk itu, masyarakat nahdliyin harus menyikapi sesuatu dengan cermat dan tidak boleh bersifat dzholim atau mencidrai kebenaran.

Tasamuh (Toleransi), merupakan sikap dari prinsip warga nahdliyin yang menghargai perbedaan dalam keberagaman. Warga nahdliyin tidak boleh bersikap diskriminasi apalagi memaksakan keyakinan sendiri terhadap orang lain. Hidup rukun dalam keberagaman menjadi kewajiban warga nahdliyin di dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Kendati demikian sikap ini diyakini hanya dalam kehidupan bersosial bukan dalam ranah akidah (keyakinan terhadap Allah).

Tawazzun (Seimbang), merupakan sikap untuk berperilaku dengan baik terhadap Allah Swt (Hablum Minallah) dan senantiasa tolong menolong terhadap sesama manusia (Hablum Minnannas). Prinsip seimbang ini bukan hanya terfokus kedalam dua hal tersebut melainkan jauh lebih dari itu, dimana warga nahdliyin dituntut untuk mampu hidup seimbang dalam kesehariannya. Seimbang terhadap Allah Swt, makhluk, lingkungan, dan segala macam perkara yang berkenaan dengan dirinya ketika berkehidupan.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Menegakan keadilan, mencegah kerusakan), warga nahdliyin harus bersikap tegas dalam menegakan kebenaran sekalipun itu sukar. Ketika melihat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syari'at dan

kehidupan muamalah (sosial) maka warga NU harus berada dibarisan terdepan. Mencegah kerusakan sebelum menyebar luas dalam aspek kehidupan harus senantiasa dilakukan oleh warga NU, karena kewajiban seorang muslim adalah menciptakan kondisi yang tentram dalam berkehidupan. Warga nahdlyin harus paham betul manakala keadilan harus diperjuangkan dan kemungkaran harus dibasmi atau dicegah dalam aspek kehidupan beragama maupun bersosial.

Pada masa kolonial para kiyai mencoba untuk melakukan aktualisasi pemikiran dalam wujud pergerakan nasional terhadap kolonialisasi belanda. Semangat pergerakan tersebut muncul pada tahun 1916, KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama beberapa kiyai, mendirikan Nahdatul Wathan beserta mars *Syubbanul Wathon* atau yang lebih kita kenal dengan syair lagu *Yaa Lal Wathan* (cinta tanah air) yang didalamnya berisi lima prinsip dasar warga nahdlyin yaitu *Tawassuth* (Moderat), *I'tidal* (keadilan), *Tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang), dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menegakan keadilan mencegah kerusakan) (Baso, 2022).

Nahdlatul Wathan hadir sebagai tempat dimana generasi bangsa dicetak secara keilmuan dan dituntun dalam semangat perjuangan kebangsaan. Prinsip dasar kebangsaan Nahdatul ulama terlihat melalui Syair lagu *Yaa Lal Wathan* (cinta tanah air), karena menjadi salah satu cara yang unik dimana lirik lagu yang memiliki makna mendalam namun sangat mudah dipahami (Anam, 2010). Syair lagu yang penuh magis ini diciptakan KH. Abdul Wahab Chasbullah, sepulangnya beliau menuntut ilmu dari Mekkah. Beliau merasa Serikat Islam (SI) bentukan Haji Oemar Said Tjokroaminoto dirasa sangat politis dan peran beliau dalam bergerak serta

berfikir dirasa tidak terlalu optimal, karena beliau menginginkan semangat perjuangan nasionalisme bangsa ini muncul melalui pendidikan (Aynina, 2019).

Hasil dari sebuah konsistensi ini melahirkan benih-benih semangat perjuangan yang menyebar secara luas ke seluruh rakyat Nusantara tanpa melihat suku, ras, dan agama mereka. Magis sangat luar biasa ini menularkan sebuah kesadaran bahwa bangsa itu nyata dan penjajahan adalah segala bentuk kejahatan manusia yang mengeksploitasi manusia lain. Penyadaran kebangsaan ini, menegaskan bahwa persatuan akan kesadaran sebuah bangsa akan menghasilkan buah kemerdekaan yang sejati, bebas dari segala macam bentuk eksploitasi bangsa asing (Baso, 2022).

2.3. Sastra dalam Pergerakan Nasional

Sastra merupakan karya seni yang memiliki struktur tata bahasa yang padat dan terkonsentrasi. Jenis-jenis sastra yang berkembang di menjadi warisan budaya bangsa Indonesia diantaranya puisi, drama, cerpen, lakon, monolog, dan dongeng. Masa pergerakan nasional tentu tak lepas dari peran karya sastra di tatanan budaya masyarakat nusantara. Sastra kita yakini sejak dahulu mengandung nilai-nilai budi pekerti untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik.

Pada abad ke 18 di Eropa karya sastra seperti puisi, monolog, drama, dan cerpen mulai populer sebagai alat propaganda ketika Revolusi Prancis. Lagu yang merupakan gambaran struktur padat dari puisi sangat populer dan digunakan sebagai propaganda perjuangan. Kondisi eropa tersebut merambah hampir keseluruhan belahan dunia. Di Indonesia karya sastra sudah identik dengan kehidupan sosial masyarakat kala itu. Pantun dan puisi yang memiliki sindir sampir sangat

populer dalam budaya masyarakat nusantara. Hampir di seluruh Nusantara budaya puisi dan pantun hadir dalam berbagai upacara adat, pernikahan, dan keagamaan (Rosidi, 1981).

Pada era pergerakan nasional, puisi juga sangat populer dan terbukti mampu memantik perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa karya puisi yang mampu memantik semangat rakyat diantaranya; *Do Not Speak* (menggambarkan kondisi penjajahan di Indonesia) Chairil Anwar tahun 1943, *Cintaku Juga Merdeka* oleh Amir Hamzah tahun 1941, *Perjuangan* oleh Sanusi Pane tahun 1945, *Syubbanul Wathan* (Cinta Tanah Air) oleh KH. Wahab Chasbullah tahun 1916, *Seandainya Aku Seorang Belanda* oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1913 dan lain-lain (Bambang & Slamet, 2018).

Karya sastra yang berbentuk drama atau puisi mulai populer pada tahun 1900-an sebagai alat propaganda perjuangan melalui berbagai macam karya puisi dan drama yang menggambarkan penderitaan rakyat. Gambaran dari puisi dan drama ini memantik perjuangan rakyat untuk bersatu pada dalam satu gerakan nasional untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Puisi-puisi tersebut di aransemen dan dijadikan sebagai sebuah lagu yang memiliki pesan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa lagu perjuangan yang senantiasa memberi semangat para pejuang diantaranya; *Indonesia Raya* oleh W.R Supratman tahun 1924, *Bagimu Negeri* oleh R. Khusbini tahun 1942, *Maju Tak Gentar* oleh C. Simanjuntak tahun 1942, *Bangun Pemuda Pemudi* oleh Alfred Simanjuntak tahun 1943, *Syukur* oleh Husein Mutahar tahun 1944, *Hari Merdeka* oleh Husein Mutahar

tahun 1947, Berkibarlah Benderaku oleh Ibu Soed tahun 1947, dan Indonesia Pusaka oleh Ismail Marzuki tahun 1949 (Rosidi, 1981).

Perjalanan sastra di era pergerakan nasional terbukti mampu memotivasi semangat rakyat kala itu. Syair lagu yang memiliki pesan perjuangan untuk melawan penjajahan dalam bentuk apapun, memberi api semangat perlawanan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang bersatu, berdaulat, merdeka, adil dan makmur menjadi ciri khas lirik lagu di masa perjuangan. Salah satu lagu pergerakan nasional yang ikonik adalah Lagu Indonesia Raya cipta WR. Supratman. Sebuah maha karya yang menjadi identitas kebangsaan yang memuat tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

2.4. Analisis Wacana

Wacana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis melalui proses pertimbangan berdasarkan akal sehat. Menurut Van Dijk (dalam Hamilton dkk 2001), wacana merupakan tindak tutur atau rangkaian ujar yang mengungkapkan subjek secara teratur, sistematis dan koheren yang dibentuk oleh unsur segmental dan nonsegmental. Seorang ahli Linguistik teks dari Belanda, bernama Teun A. Van Dijk menggambarkan wacana kedalam tiga dimensi, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Teun A. Van Dijk menggali teks yang abstrak secara konkrit menjadi sebuah konstruksi berpikir yang mampu diketahui makna, peran, dan arti dalam pengaruh sosial. Fokus dari analisis wacana menurut Teun A. Van Dijk adalah menganalisis Tindakan, konteks sosial, historis, kekuasaan, dan ideologi (Hamilton dkk, 2001).

Wacana dalam teks dijelaskan sebagai suatu fenomena sosial yang terbentuk atas kekuatan dan ketidak setaraan. Maka teks memiliki pesan yang terstruktur berdasarkan pertimbangan melalui proses berpikir dengan beberapa pertimbangan dalam dimensi struktur pembentuk teks tersebut. Wacana memiliki suatu tujuan yang berisi informasi, ide, dan gagasan yang bersifat koheren yang bertujuan agar pendengar atau pembaca memahami maksud dan konteks pesan yang disampaikan. Wacana tersebut (Fachruddien dkk., 2012)

Wacana kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah pesan dalam teks ataupun video yang menjelaskan tentang prinsip dan konsep berbangsa dan bernegara. Wacana dalam kebangsaan dibahas sebagai suatu konsep yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara bersama-sama. Wacana kebangsaan berisi paham yang dijelaskan sebagai sebuah ide dan gagasan yang memiliki makna. Dengan makna tersebut diharapkan tujuan berbangsa dan bernegara terus bisa mendorong dan menjadi sebuah gagasan untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, tentram, sejahtera, dalam persatuan dan keberagaman.